

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN SEBAGAI INDIKATOR MUTU LAYANAN MANAJEMEN SEKOLAH

Teguh Triwiyanto

FIP Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang 65145
e-mail: teguhtri_um@yahoo.com

Abstract: National Standards of Education as Quality Indicators of School Management Services.

The purpose of this study is to describe how national standards of education can serve as an indicator of the quality of school management services. The indicators of the quality cover objectives, principles, and types of services. The objectives are used as the basis for achieving quality services. The principles of the school management services show strong will of using them as the school standards. The types of school management services cover a wide range of activities carried out through program planning, program implementation, program evaluation, and follow-up programs.

Keywords: school management services, national standards of education

Abstrak: Standar Nasional Pendidikan sebagai Indikator Mutu Layanan Manajemen Sekolah. Tujuan

penelitian ini yaitu mendeskripsikan standar nasional pendidikan sebagai indikator mutu layanan manajemen sekolah. Indikator mutu layanan manajemen sekolah didasarkan pada tujuan, prinsip, dan jenis layanan. Indikator tujuan layanan manajemen sekolah menunjukkan bahwa standar nasional pendidikan dijadikan sebagai pencapaian indikator mutu. Prinsip layanan manajemen sekolah menunjukkan kepentingan kuat sekolah menjadikannya sebagai standar. Indikator jenis layanan manajemen sekolah meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan program, pelaksanaan program, evaluasi program, dan tindak lanjut program.

Kata kunci: standar nasional pendidikan, layanan manajemen sekolah

Layanan yang diberikan institusi pendidikan atau sering disebut dengan layanan manajemen sekolah belakangan ini menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah, orang tua peserta didik, pemakai jasa pendidikan, dan masyarakat. Pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya berusaha meningkatkan mutu layanan yang diberikan institusi pendidikan kepada masyarakat. Usaha perbaikan tersebut antara lain berupa perluasan akses, standar nasional pendidikan, standar layanan minimal, perbaikan sarana dan prasarana, beasiswa peserta didik miskin, dan dekonsentrasi dana pendidikan. Masyarakat semakin besar memberikan perhatian terhadap pendidikan, terutama melalui kesadaran terhadap kebutuhan mutu layanan manajemen sekolah yang baik.

Secara sederhana, unsur-unsur dalam pendidikan dapat diringkas menjadi dua aspek yang memengaruhi keberhasilan proses pendidikan, yaitu aspek yang berasal dalam diri individu yang sedang belajar, dan

aspek yang berasal dan luar diri individu. Aspek yang terdapat di dalam individu dikelompokkan menjadi dua aspek, yaitu aspek psikis dan aspek fisik. Kedua aspek tersebut keberadaannya ada yang ditentukan oleh aspek keturunan, ada juga yang oleh aspek lingkungan, dan ada pula yang ditentukan oleh keturunan dan lingkungan. Aspek yang berasal dan luar individu dikelompokkan menjadi aspek lingkungan alam, pendidik, metode mengajar, kurikulum, program, metode pelajaran, sarana dan prasarana, dan kondisi sosial-ekonomi.

Aspek yang berasal dari luar individu memerlukan pengelolaan (manajemen) untuk mengarahkan pada tujuan pendidikan. Keberhasilan pengelolaan aspek-aspek tersebut akan meningkatkan mutu proses dan mutu hasil pendidikan. Peningkatan mutu tersebut tentu saja dapat diukur melalui adanya perbaikan-perbaikan efisiensi dan keefektifan pendidikan.

Standar sekolah yang baik akan memunculkan banyak alternatif aspek dan indikator untuk menentukan mutu pendidikan. Kalau aspek dan indikator tersebut diajukan kepada orang-orang sekitar, bisa dipastikan jawabannya bermacam-macam. Ada yang langsung mengacu kepada status sekolah bersangkutan, termasuk sekolah favorit atau tidak. Mungkin ada juga yang memberikan sejumlah kriteria, seperti reputasi sekolah, kurikulum, “nasib” lulusan (porsi di antara mereka yang diterima di sekolah favorit jenjang berikutnya atau jumlah mereka yang diterima di perusahaan elite), tingkat kesulitan tes masuk, rasio peserta didik dan pendidik, lokasi, SPP dan uang gedung, keunikan sekolah (sekolah internasional atau berbahasa asing), aktivitas ekstra kurikuler, dan bermacam-macam kriteria lainnya (Tjiptono, 2008).

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas pada saat sekarang dapat dijawab melalui adanya standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi standar ini yaitu sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Tujuan standar ini menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Saat ini standar nasional pendidikan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Tentu saja perkembangan pembangunan, kemajuan pendidikan, dan kebutuhan masyarakat akan menjadikan standar nasional pendidikan mengalami penyesuaian terus menerus.

Sesuai dengan tujuan penelitian, artikel ini bermaksud untuk mendeskripsikan standar nasional pendidikan sebagai indikator mutu layanan manajemen sekolah. Indikator mutu layanan manajemen sekolah didasarkan pada tujuan, prinsip, dan jenis layanannya. Standar nasional pendidikan dijalankan melalui berbagai jenis layanan manajemen sekolah yaitu pe-

rencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut program.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Jenis studi kasus (*case studies*) yang digunakan yaitu multi-situs induksi analitis termodifikasi. Lokasi penelitian meliputi dua sekolah menengah pertama, yaitu SMP negeri dan SMP swasta unggulan, semuanya berlokasi di Malang Raya.

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan studi kasus dengan desain kualitatif, kehadiran peneliti di tengah latar penelitian merupakan suatu keharusan, karena peneliti dalam sebuah penelitian kualitatif merupakan instrumen kunci untuk menangkap makna, sekaligus sebagai alat pengumpulan data, dalam hal ini peneliti akan semaksimal mungkin terjun langsung mengumpulkan data yang diinginkan. Jenis data yang digunakan oleh dalam mengumpulkan data peneliti berhubungan langsung dengan sumbernya, seperti mengadakan wawancara, mengamati, mendengarkan, menafsirkan, dan menganalisis. Di samping itu, agar lebih maksimal dalam pengumpulan data, peneliti juga mencari data penting seperti dokumen-dokumen, catatan-catatan, foto, agenda, dan arsip-arsip.

Analisis data yang digunakan adalah analisis nonstatistik, karena data yang diperoleh yaitu data yang berupa deskriptif. Analisis data dilakukan setelah pengumpulan dan diolah untuk mengembangkan model deskripsi yang merangkum semua fenomena. Peneliti berusaha melukiskan dan menafsirkan data yang ada, sehingga pekerjaan peneliti hanyalah menjelaskan proses yang terjadi, menyatakan baik atau tidak, menjelaskan keunggulan dan kelemahannya, dan sesuai atau tidaknya proses yang dilakukan dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Temuan hasil analisis *comparative constan* menunjukkan bahwa standar nasional pendidikan sebagai indikator tujuan layanan manajemen sekolah meliputi hal-hal berikut. Layanan kurikulum dan pembelajaran sejalan dengan kebijakan standar pendidikan nasional, terutama sebagai dasar atau standar dalam proses pendidikan. Kompetensi lulusan menjadi tujuan layanan peserta didik. Layanan pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan pencapaian kinerja dalam manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, menciptakan

kondisi kerja yang harmonis tanpa mengorbankan unsur-unsur manusia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan. Acuan penggunaan keuangan sekolah untuk pembiayaan program kegiatan sekolah dengan skala prioritas dan mengarahkan dana tepat pada sasaran kegiatan merupakan tujuan layanan keuangan pendidikan. Layanan sarana dan prasarana bertujuan untuk memenuhi standar nasional yang ada. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk membantu sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan.

Makna indikator tujuan layanan manajemen sekolah dari hasil temuan setiap aspek tersebut menunjukkan bahwa standar nasional pendidikan dijadikan sebagai pencapaian indikator mutu. Layanan kurikulum dan pembelajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat diarahkan untuk memperbaiki mutu untuk mencapai tujuan pendidikan. Akhir dari tujuan layanan tersebut yaitu peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai atau melebihi standar nasional pendidikan.

Selanjutnya, hasil analisis *comparative constan*, indikator prinsip layanan manajemen sekolah didapatkan temuan yang bermakna pada setiap aspek prinsip

layanan manajemen sekolah. Indikator mutu layanan manajemen sekolah tampak pada prinsip yang dilaksanakannya yaitu (1) layanan kurikulum dan pembelajaran disesuaikan dengan standar nasional, karakter sekolah, dan eksistensi pendidikan yang sesuai perkembangan zaman; (2) perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi prinsip layanan peserta didik; (3) prinsip layanan pendidik dan tenaga kependidikan berupa upaya kerja sama dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan berupa aktivitas perencanaan, seleksi, pembinaan, sampai dengan berhentinya pendidik dan tenaga kependidikan untuk hasil yang efektif dan efisien; (4) hati-hati dalam mengelola, kerja sama, perhitungan yang teliti, dan pengawasan merupakan prinsip layanan keuangan pendidikan; (5) prinsip layanan sarana dan prasarana yaitu efisiensi pemakaian pada setiap bidang, prinsip dibuat agar sarana dan prasarana dapat berguna secara efektif dan efisien; dan (6) partisipasi masyarakat memiliki prinsip bahwa perlu adanya hubungan saling menguntungkan kedua belah pihak dan memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan sekolah dan masyarakat.

Tabel 1. Matriks Perbandingan Indikator Tujuan Layanan Manajemen Sekolah

Layanan	SMP Negeri	SMP Swasta
• Kurikulum dan Pembelajaran	Sebagai pedoman penyelenggaraan sekolah dan pedoman operasional yang dikembangkan berdasarkan SKL yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, memuat standar isi yang mencakup materi dan tingkat kompetensi, dan sebagai bentuk tanggung jawab sekolah kepada masyarakat dan pemerintah.	Dijadikan dasar dalam proses pendidikan yang didasarkan pada standar nasional.
• Peserta Didik	Terwujudnya lulusan yang cerdas, kompetitif, cinta tanah air berdasarkan iman dan taqwa, terwujudnya kinerja delapan standar dengan bersinergi, dan terwujudnya budaya mutu sekolah.	Membentuk peserta didik dengan ketaqwaan dalam hal ibadah, hafalan, akhlak, kepribadian islam, dan semangat perjuangan, membentuk kecerdasan terutama nonakademik bidang <i>life skill</i> , dan membentuk kemandirian agar mampu menghasilkan karya.
• Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Menciptakan kondisi kerja yang harmonis tanpa mengorbankan unsur-unsur manusia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan kerja sama antara pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai tujuan sekolah.	Sebagai seperangkat indikator-indikator pencapaian kinerja dalam manajemen pendidik dan tenaga kependidikan.
• Keuangan Pendidikan	Pedoman sekolah dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan sebagai acuan penggunaan keuangan sekolah untuk pembiayaan program kegiatan sekolah.	Melakukan pembiayaan sesuai dengan skala prioritas dan mengarahkan dana tepat pada sasaran kegiatan.
• Sarana dan Prasarana	Sebagai dasar pengadaan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Layanan ini dilaksanakan sesuai kebutuhan untuk proses pembelajaran dan melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan. Layanan ini diselenggarakan agar selalu dapat memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan yang efektif.	Memudahkan dalam perencanaan sarana dan prasarana. Selain itu untuk memperbaiki tata kelola, sebab kadang karena didesak oleh waktu untuk segera membeli sarana dan prasarana akhirnya spesifikasi dan kualitas kurang diperhatikan.
• Partisipasi Masyarakat	Mencapai tujuan pendidikan.	Memudahkan untuk meminta bantuan dan dukungan dari masyarakat, memudahkan perbaikan pengelolaan karena pengadaan sarana dan prasarana dari masyarakat.

Tabel 2. Matriks Perbandingan Indikator Prinsip Layanan Sekolah

Layanan	SMP Negeri	SMP Swasta
• Kurikulum dan Pembelajaran	Berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan peserta didik dan lingkungan secara nasional/internasional, beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan seni, relevan dengan kebutuhan hidup, menyeluruh dan berkeeseimbangan, belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah, berkelanjutan dan mampu bersaing di dunia internasional, dan eksistensi pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman.	Untuk layanan kurikulum dan pembelajaran disesuaikan dengan standar nasional dan juga disesuaikan dengan karakter sekolah.
• Peserta Didik	Bahwa tatanan/aturan untuk mengelola peserta didik dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi	Mengatur berbagai macam kegiatan peserta didik untuk menggali dan melejitkan potensinya dalam bentuk prestasi akademik atau nonakademik untuk mewujudkan visi dan misi sekolah.
• Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Merupakan upaya kerja sama dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan dibidang pendidik dan tenaga kependidikan.	Berupa aktivitas perencanaan, seleksi, pembinaan, sampai dengan berhenti pendidik dan tenaga kependidikan untuk hasil yang efektif dan efisien.
• Keuangan Pendidikan	Adanya kerja sama sekolah/warga sekolah, keterbukaan, dan kekeluargaan merupakan faktor pendorong yang positif.	Adanya perhitungan keperluan dana yang dibutuhkan masing-masing bagian dan menyerahkan buku penggunaan dana secara berkala.
• Sarana dan Prasarana	Efisiensi pemakaian pada setiap bidang, prinsip dibuat agar sarana dan prasarana dapat berguna secara efektif dan efisien.	Pengadaan, pemakaian, dan perawatan dilakukan dengan melihat karakteristik sarana dan prasarana.
• Partisipasi Masyarakat	Peran serta, loyalitas, dukungan, dan kerja sama antara sekolah dan masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan.	Membangun hubungan saling menguntungkan kedua belah pihak dan memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan sekolah dan masyarakat.

Makna indikator prinsip layanan manajemen sekolah dari hasil temuan setiap aspek menunjukkan bahwa sekolah memiliki kepentingan kuat menjadikannya sebagai standar. Kepentingan tersebut titik tekannya diletakkan pada usaha membangun kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan pemenuhan standar nasional pendidikan. Layanan kurikulum dan pembelajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat diarahkan kepada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara hati-hati dalam mengelola, kerja sama, dan perhitungan yang teliti.

Indikator prinsip layanan manajemen sekolah antara SMP Negeri dengan swasta unggulan dapat dilihat pada Tabel 2. Indikator prinsip layanan tersebut memperlihatkan hasil analisis *comparative constant*, yaitu berupa indikator prinsip layanan manajemen sekolah.

Selanjutnya indikator jenis layanan manajemen sekolah dari hasil analisis didapatkan temuan bahwa (1) jenis layanan kurikulum dan pembelajaran meliputi perencanaan program, pelaksanaan program, evaluasi program; dan tindak lanjut program; bentuknya berupa antara lain struktur kurikulum, pembagian tugas mengajar, dan pengaturan beban mengajar; (2) keor-

ganisasian dengan agenda rutinnnya, ekstrakurikuler dengan pencapaian target, tim olimpiade untuk melejitkan prestasi, dan kegiatan insidental lainnya merupakan jenis layanan peserta didik; (3) jenis layanan pendidik dan tenaga kependidikan berupa pengadaan, seleksi, pembinaan sampai dengan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan; (4) biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal; pengaturan bersifat transparan, akuntabel, dan partisipatif; pengaturan ini melibatkan kepala sekolah, bendahara, dan tim pengelola keuangan merupakan jenis layanan keuangan pendidikan; (5) jenis layanan sarana dan prasarana yaitu perencanaan, pengadaan/pembelian, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan; penerapannya dilakukan berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan secermat mungkin serta adanya pengawasan dari kepala sekolah; dan (6) partisipasi masyarakat jenisnya berupa layanan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam kegiatan sosial, pembinaan, dan pendidikan serta membangun keunggulan sekolah untuk dikenal di masyarakat dengan pelibatan masyarakat.

Indikator jenis layanan manajemen sekolah antara SMP negeri dan swasta unggulan dapat dilihat pada Tabel 3. Indikator jenis layanan tersebut memperlihatkan hasil analisis *comparative constant*, yaitu berupa indikator jenis layanan manajemen sekolah.

Tabel 3. Matriks Perbandingan Indikator Jenis Layanan Sekolah

Layanan	SMP Negeri	SMP Swasta
• Kurikulum dan Pembelajaran	Merencanakan program, pelaksanaan program, evaluasi program; dan tindak lanjut program.	Struktur kurikulum, pembagian tugas mengajar, dan pengaturan beban mengajar.
• Peserta Didik	Penerimaan peserta didik baru, penempatan kelas, orientasi, ekstrakurikuler, dan lain-lain	Keorganisasian dengan agenda rutinnya, ekstrakurikuler dengan pencapaian target, tim olimpiade untuk melejitkan prestasi, dan kegiatan insidental lainnya (PHBN, PHBI, dan lain-lain).
• Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Perencanaan merupakan kegiatan untuk mengarahkan sumber-sumber yang terbatas secara efektif dan efisien, pelaksanaan merupakan upaya merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, dan pengawasan serta pembinaan sebagai upaya pengendalian secara profesional.	Pengadaan, seleksi, pembinaan sampai dengan penghentian pendidik dan tenaga kependidikan.
• Keuangan Pendidikan	Biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Pengaturan bersifat transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pengaturan ini melibatkan kepala sekolah, bendahara, dan tim pengelola keuangan.	Pembiayaan sekolah digunakan untuk membiayai kurikulum dan pembelajaran, kepeserta didikan, kepengasuhan, tata usaha, dan pengeluaran insidental.
• Sarana dan Prasarana	Pengadaan jangka pendek, menengah, dan panjang.	Perencanaan, pengadaan/pembelian, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan. Penerapannya dilakukan berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan secermat mungkin serta adanya pengawasan dari kepala sekolah.
• Partisipasi Masyarakat	Pengadaan sarana/prasarana, mendukung kegiatan peserta didik, sebagai sara sumber kegiatan peserta didik, dan kerja sama.	Layanan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam kegiatan sosial, dakwah, dan pendidikan serta membangun keunggulan sekolah untuk dikenal di masyarakat dengan pelibatan masyarakat.

Makna indikator jenis layanan manajemen sekolah dari hasil temuan setiap aspek di atas jenisnya meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan program, pelaksanaan program, evaluasi program, dan tindak lanjut program. Layanan kurikulum dan pembelajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, sarana dan prasarana, dan partisipasi masyarakat dilakukan untuk memenuhi standar pendidikan nasional.

Berdasarkan temuan-temuan penelitian di atas, diformulasikan proposisi (P) penelitian sebagai berikut. (P1) Pelaksanaan layanan kurikulum dan pembelajaran sejalan dengan kebijakan standar nasional pendidikan, terutama sebagai dasar atau standar dalam proses pendidikan, sehingga jenis layanan kurikulum dan bentuk pelayanannya diaesuaikan dengan standar tersebut; (P2) Jika sekolah memaknai mutu layanan manajemen peserta didik dengan indikator nonakademik, maka perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi prinsip layanan peserta didik. Mendorong tercapainya indikator melalui kegiatan-kegiatan keorganisasian dengan agenda rutinnya, ekstrakurikuler dengan pencapaian target, tim olimpiade untuk melejitkan prestasi, dan kegiatan insidental lainnya; (P3) Jika layanan pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan menciptakan kondisi

kerja yang harmonis tanpa mengorbankan unsur-unsur manusia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan, maka prinsip layanannya berupa upaya kerja sama dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan; (P4) Semangat hati-hati dalam mengelola, kerja sama, perhitungan yang teliti, dan pengawasan dalam layanan keuangan pendidikan merupakan pemahaman pengelola dalam penggunaan keuangan sekolah; (P5) Terdapat hubungan pemenuhan, penerapan, prinsip layanan sarana dan prasarana terhadap perilaku pengelolaan dan pencapaian standar nasional pendidikan; dan (P6) Jika sekolah memiliki prinsip bahwa perlu ada hubungan saling menguntungkan dan memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan sekolah dan masyarakat, maka sekolah menonjolkan kegiatan sosial, pembinaan, dan pendidikan serta membangun keunggulan sekolah untuk dikenal di masyarakat dengan pelibatan masyarakat.

Pembahasan

Tujuan diadakannya layanan manajemen sekolah adalah optimalisasi kinerja setiap substansi untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditentukan. Arikunto dan Yuliana (2012) menyebut substansi manajemen sekolah ini dengan istilah *bidang garapan*. Betapapun kecilnya suatu organisasi pendidikan, tentu

memiliki unsur-unsur bidang garapan/substansi itu. Hanya proporsi dari masing-masing unsur tersebut saja yang tidak sama. Unsur-unsur substansi/garapan itu meliputi layanan kurikulum dan pembelajaran, layanan peserta didik, layanan pendidik dan tenaga kependidikan, layanan keuangan pendidikan, layanan sarana dan prasarana, dan partisipasi masyarakat. Purwanto (2009) menyatakan bahwa semua kegiatan sekolah akan dapat berjalan lancar dan berhasil baik jika pelaksanaannya melalui proses-proses yang terdapat dalam unsur-unsur substansi/garapan garapan tersebut. Proses yang dimaksud yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara baik. Optimalisasi unsur-unsur substansi/garapan dilakukan dengan mengelola semua sumber daya yang ada (manusia dan nonmanusia) melalui pelaksanaan prinsip-prinsip manajemen sekolah yang terukur dan akuntabel.

Usaha mencapai tujuan setiap bidang substansi/garapan layanan manajemen sekolah tersebut tidak bisa dilepaskan dari perilaku manusia dalam kegiatannya sebagai subjek dan objek. Usman (2010) menyatakan bahwa secara filosofis, perilaku manusia terbentuk oleh interaksi antarmanusia, iklim organisasi (konteks organisasi), dan sistem yang dianut. Ketiga interaksi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, saling berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Interaksi keempat faktor itulah yang memengaruhi perilaku pengelola pendidikan.

Aspek filosofis seperti diungkapkan di atas memperlihatkan kesesuaian dengan hasil penelitian ini, bahwa kebijakan standar nasional pendidikan dijadikan basis dalam memberikan layanan manajemen sekolah. Artinya, di dalam pemenuhan standar nasional pendidikan terdapat interaksi antarmanusia, iklim organisasi (konteks organisasi), dan sistem. Pada sisi lainnya, sekolah memiliki kepentingan kuat untuk memberikan layanan. Kepentingan tersebut titik tekannya diarahkan pada usaha membangun kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Akhir dari tujuan layanan tersebut yaitu sekolah berusaha melakukan pengelolaan pendidikan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai atau melebihi standar nasional pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar nasional pendidikan dijadikan sekolah sebagai landasan untuk menentukan aktivitas dan perbaikan-perbaikan program untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah itu diperlukan kerja sama semua warga sekolah (pendidik, peserta didik, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan) dan pihak-pihak di luar sekolah yang ada kaitannya dengan sekolah (orang tua, dinas pendidikan, yayasan, pusat kesehatan masyarakat, dan lain-lain). Kerja sama tersebut harus dipupuk dan dibina untuk mencapai sum-

bangun yang optimal dalam mencapai tujuan sekolah. Hubungan atau kerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan berbagai aspeknya ini dapat dipandang sebagai layanan manajemen sekolah.

Suryosubroto (2010) mengingatkan bahwa layanan manajemen sekolah merupakan sistem, berusaha melihat bagian-bagian sistem itu serta interaksinya satu sama lain. Bagian-bagian itu sering juga disebut dengan aspek, komponen atau substansi. Melalui peninjauan aspek-aspek tersebut serta hubungannya satu dengan lainnya, diharapkan dapat ditemukan kekurangan-kekurangannya, sehingga dapat ditetapkan apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki aspek itu atau mengembangkannya.

Salah satu aspek atau substansi layanan manajemen sekolah yaitu layanan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah. Kompetensi perlu dicapai secara tuntas. Kurikulum dilaksanakan dalam rangka membantu peserta didik mengembangkan berbagai potensi psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial-emosional, kognitif, bahasa, fisik/motorik, kemandirian, dan seni.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa layanan ini sejalan dengan kebijakan standar pendidikan nasional, terutama sebagai dasar atau standar dalam proses pendidikan. Pelaksanaan layanan kurikulum dan pembelajaran sejalan dengan kebijakan standar nasional pendidikan, terutama sebagai dasar atau standar dalam proses pendidikan, sehingga jenis layanan kurikulum dan bentuk pelayanannya menyesuaikan dengan standar tersebut. Dasar atau landasan tersebut untuk menjadikan lulusan sesuai atau bahkan lebih dari standar kompetensi lulusan.

Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran memberikan makna bahwa di dalam kurikulum terdapat panduan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Dengan demikian, kurikulum berfungsi sebagai “nafas” atau “inti” dari proses pendidikan di sekolah untuk memberdayakan potensi peserta didik. Interaksi di dalam kegiatan tersebut membutuhkan layanan dari sekolah. Layanan manajemen kurikulum dan pembelajaran merupakan salah satu aspek atau substansi pendidikan yang sangat strategis karena merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Hernawan dan Cynthia (2011) menyatakan bahwa kurikulum berperan dalam pencapaian tujuan pendidikan, yaitu memiliki peran konservatif, kreatif, kritis, dan evaluatif.

Sudarsyah dan Nurdin (2009) menyebutkan bahwa layanan manajemen kurikulum dan pembelajaran ini harus memperhatikan prinsip dan fungsinya. Prinsip dan fungsi tersebut meliputi produktifitas, demokratisasi, kooperatif, efektifitas dan efisiensi, dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Hasil penelitian Kasman (2010) menunjukkan bahwa, untuk pelayanan manajemen kurikulum dan pembelajaran, sekolah melakukan improvisasi yang meliputi substansi dan manajerial. Kedua pendapat di atas dalam implementasinya membutuhkan pendidik yang memiliki kapasitas berdasarkan keahliannya dalam memberikan layanan manajemen kurikulum dan pembelajaran yang optimal.

Sejalan dengan indikator prinsip dan fungsi tersebut di atas, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa kurikulum dan pembelajaran berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan peserta didik dan lingkungan secara nasional/internasional, beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan seni, relevan dengan kebutuhan hidup, menyeluruh dan berkeeseimbangan, belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah, berkelanjutan dan mampu bersaing di dunia internasional, dan eksistensi pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nasution (2012) menyebutkan bahwa tiap kurikulum mencerminkan keinginan, cita-cita, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat. Sekolah didirikan oleh dan untuk masyarakat, sudah sewajarnya pendidikan memperhatikan dan merespon suara-suara dalam masyarakat.

Keberhasilan layanan kurikulum dan pembelajaran di atas ditunjang dan erat berkaitan dengan layanan manajemen peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator tujuan dan prinsip layanan ini untuk mengatur berbagai macam kegiatan peserta didik untuk menggali dan melejitkan potensinya dalam bentuk prestasi akademik atau nonakademik untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Selain itu terdapat juga kegiatan penerimaan peserta didik baru, penempatan kelas, orientasi, ekstrakurikuler, dan lain-lain.

Layanan manajemen peserta didik merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan dan layanan peserta didik di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai dia matang di sekolah. Berarti, layanan peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah yang diatur yaitu segi-segi yang berkenaan dengan peserta didik secara langsung dan tidak langsung (Imron & Burhanuddin, 2003). Arikunto dan Yuliana (2012) mengatakan bahwa layanan ma-

najemen peserta didik meliputi penerimaan, ketatausahaan, pencatatan bimbingan dan penyuluhan, dan pencatatan prestasi peserta didik.

Penelitian Suratman (2010) menunjukkan bahwa untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik dibutuhkan dukungan layanan banyak aspek pendidikan. Aspek-aspek tersebut meliputi kompetensi manajerial kepala sekolah, layanan sarana dan prasarana, kapabilitas pendidik, dan dukungan orang tua. Chairunnisa (2013) dari hasil penelitiannya membuktikan bahwa keefektifan organisasi sekolah dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah. Simpulan penelitian Siswono dkk. (2013) menekankan bahwa untuk mendorong berpikir kreatif peserta didik dibutuhkan pendidik yang telah berdaya dan memiliki kemampuan mengembangkan pembelajaran.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, layanan manajemen peserta didik diberikan dari awal peserta didik masuk sampai dengan peserta didik lulus sekolah atau sebab lain. Jika sekolah memaknai mutu layanan manajemen peserta didik dengan indikator nonakademik, maka perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi prinsip layanan peserta didik. Untuk mengoptimalkan layanan ini, diperlukan usaha dan kerja keras sekolah untuk mendorong kinerjanya. Sekolah dapat mendorong tercapainya indikator melalui kegiatan-kegiatan keorganisasian dengan agenda rutinnya, ekstrakurikuler dengan pencapaian target, tim olimpiade untuk melejitkan prestasi, dan kegiatan insidental lainnya. Tentu saja kompetensi manajerial kepala sekolah dan kapabilitas pendidik juga merupakan aspek yang tidak kalah penting, keduanya masuk dalam layanan pendidik dan tenaga kependidikan.

Tujuan layanan pendidik dan tenaga kependidikan yaitu pencapaian kinerja dalam manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, menciptakan kondisi kerja yang harmonis tanpa mengorbankan unsur-unsur manusia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa layanan ini meliputi beberapa bentuk, yaitu berupa aktivitas perencanaan, seleksi, pembinaan, sampai dengan berhenti pendidik dan tenaga kependidikan untuk hasil yang efektif dan efisien. Layanan pendidik dan tenaga kependidikan ini terkait dengan kompetensi yang pada gilirannya dapat diukur mutu dan kadar profesionalitasnya. Hasil penelitian Subroto (2011) menyatakan bahwa pemberdayaan kompetensi pendidik berpengaruh terhadap kinerja pendidik dan kualitas pendidikan. Artinya, layanan ini akan baik jika didukung oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten.

Selain kompetensi yang harus dimiliki, strategi penyelenggaraan dan pemberdayaan layanan mana-

jemen pendidik dan tenaga kependidikan juga mutlak diperlukan. Murniati AR (2009) dalam kesimpulan penelitiannya menyatakan bahwa perumusan strategi penyelenggaraan sekolah diawali dengan perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target sekolah. Sedangkan strategi pemberdayaan manajemen dapat dilakukan melalui proses pembelajaran, kegiatan hubungan kerja sama, pengembangan sumber daya, dan menyosialisasikan eksistensi sekolah.

Terdapat mitos-mitos dalam pengelolaan pendidikan selama ini bahwa pendidik terutama bertanggung jawab terhadap masalah mutu pendidikan sekolah. Pendidik dapat melakukan pekerjaan dengan kompetensi yang baik tetapi mereka tidak memiliki motivasi untuk melaksanakannya. Kompetensi akan mendapat prioritas tertinggi kalau pengelola tingkat atas membuat ketetapan. Untuk mengubah perilaku orang, pertama kali sikapnya perlu di rubah. Mitos-mitos di atas mungkin tidak tepat.

Fakta-fakta berikut merupakan jawaban bahwa mitos-mitos di atas tidak tepat. Ada mitos bahwa 80%-90% kerusakan akibat rendahnya kompetensi berasal dari tindakan manajemen. Kenyataannya, banyak pendidik sebenarnya memang tidak kompeten. Kenyataannya hal tersebut tidak terjadi. Kadang itu benar, tetapi biasanya tidak: kalau kita mengubah perbuatan atau tindakan orang lebih dahulu, itu akan mengubah sikapnya. Contohnya, pendidik yang terlibat dalam perbaikan kompetensi akan memperlihatkan daya penerimaan lebih besar, dibanding jika hanya didorong untuk mengubah sikapnya. Jika layanan pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan menciptakan kondisi kerja yang harmonis tanpa mengorbankan unsur-unsur manusia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan, maka prinsip layanannya berupa upaya kerja sama dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan.

Untuk meningkatkan kompetensi pendidik diperlukan prasyarat layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai dari pengampu kebijakan sekolah. Supriyadi (2011) dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan prasyarat peningkatan kompetensi pendidik di sekolah sangat penting karena para pendidik merupakan ujung tombak dalam melaksanakan pendidikan di sekolah. Prasyarat ini mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi sikap eksekutif, dan struktur birokrasi.

Ini sejalan dengan temuan penelitian ini bahwa kegiatan-kegiatan layanan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi perencanaan merupakan kegiatan untuk mengarahkan sumber-sumber yang terbatas secara efektif dan efisien, pelaksanaan merupakan upaya merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata un-

tuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, dan pengawasan serta pembinaan sebagai upaya pengendalian secara profesional. Strategi penyelenggaraan dan pemberdayaan layanan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan diperlukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hasil penelitian Dewi (2013) menekankan bahwa untuk meningkatkan kinerja sekolah, selain pendidik dan tenaga kependidikan, kepala sekolah juga perlu meningkatkan keterlibatan dalam tugas, melakukan pembinaan terkait kedisiplinan kerja, dan memiliki konsistensi dalam bekerja.

Untuk menopang layanan manajemen sekolah, keberadaan layanan keuangan atau pembiayaan yang merupakan acuan untuk pembiayaan program kegiatan sekolah dengan skala prioritas dan mengarahkan dana tepat pada sasaran kegiatan, menjadi penting untuk mencapai tujuan sekolah. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa manajemen ini bermakna sebagai pedoman sekolah dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan sebagai acuan penggunaan keuangan sekolah untuk pembiayaan program kegiatan sekolah.

Salah pilih variabel keuangan pendidikan memberikan sumbangan terhadap terpuruknya mutu proses dan hasil pendidikan. Variabel keuangan pendidikan biasanya dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan, gaji/kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, pembinaan profesional, pengelolaan sekolah, pengadaan alat-alat pelajaran, pemeliharaan sarana pendidikan, dan pembinaan peserta didik. Besar biaya tiap variabel tersebut bisa dijadikan petunjuk bahwa variabel yang memengaruhi mutu proses dan hasil pendidikan bervariasi.

Jika variabel biaya pendidikan memiliki kontribusi signifikan terhadap mutu proses dan hasil pendidikan, maka manipulasi layanan manajemen sekolah dapat dilakukan. Penambahan biaya *input* pendidikan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan dapat dilakukan dengan mengalokasikan biaya pada variabel yang nyata-nyata memberikan kontribusi signifikan terhadap mutu proses dan hasil pendidikan.

Semangat hati-hati dalam mengelola, kerjasama, perhitungan yang teliti, dan pengawasan dalam layanan keuangan pendidikan merupakan pemahaman pengelola dalam penggunaan keuangan sekolah. Salah pilih variabel pembiayaan pendidikan memberikan sumbangan terhadap terpuruknya mutu proses dan hasil pendidikan. Hasil penelitian Fattah (2002) menyimpulkan bahwa ada keterkaitan biaya dan mutu proses dan mutu hasil belajar. Penelitian Fuller dan Clarke (McMahon, 2001) menemukan *input* berikut yang

memiliki pengaruh yang sangat signifikan pada prestasi anak didik di negara-negara berkembang. *Input* pendidikan tersebut meliputi biaya per peserta didik, perbandingan peserta didik dengan pendidik, buku teks, buku tambahan, alat bantu mengajar, bangku, mutu fasilitas, perpustakaan sekolah, program pemberian makanan, lama pendidikan pendidik, pengetahuan pendidik terhadap pelajaran, pengalaman pendidik, dan waktu pengajaran. Fattah (2002) menyimpulkan komponen biaya pendidikan yang berkontribusi secara signifikan terhadap mutu proses dan mutu hasil belajar yaitu gaji/kesejahteraan pendidik, biaya pembinaan profesional pendidik, biaya pengadaan bahan pelajaran, biaya pembinaan peserta didik, dan biaya pengelolaan sekolah.

Selanjutnya, layanan sarana dan prasarana bertujuan untuk memenuhi standar nasional yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan ini dijadikan dasar pengadaan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Layanan ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk proses pembelajaran dan melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan. Layanan ini diselenggarakan agar selalu dapat memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan yang efektif. Terdapat hubungan pemenuhan, penerapan, prinsip layanan sarana dan prasarana dengan perilaku pengelolaan dan pencapaian standar nasional pendidikan.

Salah satu lingkup standar nasional pendidikan yaitu standar sarana dan prasarana. Standar tersebut meliputi hal-hal berikut. Sarana pendidikan pada setiap satuan pendidikan wajib dimiliki, yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Prasarana pendidikan pada setiap satuan pendidikan wajib dimiliki, yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan amanat tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Harapannya adalah tujuan pendidikan pada setiap satuan pendidikan yang telah digariskan pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 segera terwujud.

Irianto dan Sa'ud (2008) menyatakan bahwa pada praktiknya tidak semua layanan manajemen sarana dan prasarana merupakan produk inovasi yang dapat digunakan dalam proses pendidikan. Karena itu, pengembangan dan inovasi layanan manajemen sarana dan prasarana perlu berasaskan prinsip-prinsip berikut. *Relevance*, artinya bahwa pengembangan dan inovasi sarana dan prasarana pendidikan harus berkesesuaian dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam penyesuaian-penyesuaian dengan kebutuhan pengembangan pengetahuan dan keterampilan ketenagaan. *Manageble*, artinya pengembangan dan inovasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan bagian dalam pengembangan fungsi-fungsi manajemen kelembagaan. *Sustainable*, artinya bahwa pengembangan dan inovasi sarana dan prasarana pendidikan harus dapat dilihat dari keberlanjutan program. *Efficiency*, artinya pengembangan dan inovasi sarana dan prasarana pendidikan harus memperhatikan unsur efisiensi dalam kelembagaan, tidak menyebabkan penghambur-hamburan dalam pembiayaan dan waktu. *Productivity*, artinya pengembangan dan inovasi sarana dan prasarana pendidikan mengacu kepada peningkatan output dan produktivitas kelembagaan pendidikan yang bersangkutan. *Up to date*, artinya pengembangan dan inovasi sarana dan prasarana pendidikan yang dikembangkan merupakan hal yang terbaru dalam penyelenggaraan pendidikan. Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, Bafadal (2008) juga menyampaikan prinsip-prinsip dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan agar tujuan manajemen sarana dan prasarana dapat tercapai. Prinsip-prinsip tersebut yaitu prinsip pencapaian tujuan, prinsip efisiensi, prinsip administratif, prinsip kejelasan tanggung jawab, dan prinsip kekohesifan.

Yang terakhir berkenaan dengan layanan partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk membantu sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa layanan ini lebih berupaya membangun hubungan saling menguntungkan kedua belah pihak dan memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan sekolah dan masyarakat. Jika sekolah memiliki prinsip bahwa perlu ada hubungan saling menguntungkan dan memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan sekolah dan masyarakat, maka sekolah menonjolkan kegiatan sosial, pembinaan, dan pendidikan serta membangun keunggulan sekolah untuk dikenal di masyarakat dengan melibatkan masyarakat.

Maisyaroh (2004) mengatakan bahwa hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara lembaga pendidikan dan masyarakat.

kat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan dan praktik pendidikan dan pada akhirnya bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan. Manajemen hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat adalah proses mengelola komunikasi tersebut mulai dari kegiatan perencanaan sampai pada pengendalian terhadap proses dan hasil kegiatannya. Wiyono (2010) dalam simpulan penelitiannya menyebutkan bahwa faktor pendidikan, jenis pekerjaan, dan status sosial ekonomi berpengaruh terhadap partisipasinya dalam pendidikan. Oleh karena itu, untuk menjalin hubungan dengan masyarakat, sekolah memerhatikan faktor-faktor tersebut.

Ulasan di atas memperlihatkan bahwa layanan partisipasi masyarakat bertujuan untuk membangun lembaga pendidikan. Wujud dari layanan tersebut lebih menekankan pada mengelola komunikasi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Media-media atau wadah-wadah komunikasi tersebut sebenarnya sudah ada, misalnya melalui persatuan orang tua peserta didik, komite atau dewan sekolah, dewan pendidikan atau lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada bidang pendidikan.

Hasil penelitian Mas (2011) menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna pendidikan. Peran serta masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk: pendirian atau penyelenggaraan pendidikan, pengadaan dan pemberian bantuan tenaga pendidikan, pengadaan dan pemberian tenaga ahli, pengadaan dana, pengadaan dan pemberian sarana belajar, dan lain-lain.

Peran serta masyarakat yang beragam baik perorangan maupun kolektif akan sangat bermanfaat terhadap ketercapaian tujuan pendidikan. Keterlibatan masyarakat juga menumbuhkan rasa memiliki yang kuat terhadap keberhasilan dan pencapaian program-program pendidikan yang dijalankan sekolah. Program yang didukung masyarakat menjadikan setiap ketercapaian tujuan sekolah akan semakin menumbuhkan kebersamaan dan kebanggaan lebih bermakna. Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan program-program tersebut akan meningkatkan mutu proses dan mutu hasil pendidikan.

SIMPULAN

Pelaksanaan layanan kurikulum dan pembelajaran sejalan dengan kebijakan standar nasional pendidikan,

terutama sebagai dasar atau standar dalam proses pendidikan, sehingga jenis layanan kurikulum dan bentuk pelayanannya menyesuaikan dengan standar tersebut. Jika sekolah memaknai mutu layanan manajemen peserta didik dengan indikator nonakademik, maka perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi prinsip layanan peserta didik. Mendorong tercapainya indikator melalui kegiatan-kegiatan keorganisasian dengan agenda rutinnnya, ekstrakurikuler dengan pencapaian target, tim olimpiade untuk melejitkan prestasi, dan kegiatan insidental lainnya. Jika layanan pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan menciptakan kondisi kerja yang harmonis tanpa mengorbankan unsur-unsur manusia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan, maka prinsip layanannya yaitu berupa upaya kerja sama dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan.

Semangat hati-hati dalam mengelola, kerjasama, perhitungan yang teliti, dan pengawasan dalam layanan keuangan pendidikan merupakan pemahaman pengelola dalam penggunaan keuangan sekolah. Terdapat hubungan pemenuhan, penerapan, prinsip layanan sarana dan prasarana terhadap perilaku pengelolaan dan pencapaian standar nasional pendidikan. Jika sekolah memiliki prinsip bahwa perlu adanya hubungan saling menguntungkan dan memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan sekolah dan masyarakat, maka sekolah menonjolkan kegiatan sosial, pembinaan, dan pendidikan serta membangun keunggulan sekolah untuk dikenal di masyarakat dengan pelibatan masyarakat.

Beberapa saran diajukan. Pertama, tujuan standar nasional pendidikan sebagai indikator mutu layanan manajemen sekolah harus tetap memperhatikan nilai-nilai dan standar yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Memenuhi standar nasional pendidikan merupakan kewajiban, tetapi merespon dinamika masyarakat juga merupakan kewajiban sekolah yang hidup di tengah masyarakat. Nilai dan standar yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bahkan memungkinkan dijadikan pengayaan bagi sekolah. Kedua, usaha sekolah membangun kepercayaan masyarakat membutuhkan keterlibatan yang kuat dari pemerintah daerah. Peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan yang aspiratif dan prorakyat berlandaskan standar nasional pendidikan dapat meningkatkan mutu dan kepercayaan masyarakat kepada pendidikan. Kepercayaan masyarakat akan menumbuhkan partisipasi dan kepedulian tinggi kepada pendidikan. Pada akhirnya, melalui peningkatan mutu layanan manajemen sekolah akan memperbaiki mutu sekolah, dukungan pemerintah, dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, S. & Yuliana, L. 2012. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Bafadal, I. 2008. *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Chairunnisa, C. 2013. Kepemimpinan, Sistem dan Struktur Organisasi, Lingkungan Fisik, dan Keefektifan Organisasi Sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 19 (1): 56-60.
- Dewi, R. 2013. Kinerja Kepala sekolah: Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Konflik dan Efikasi Diri. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 19 (1): 150-166.
- Fattah, N. 2002. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hernawan, A.H. & Cynthia, R. 2011. *Pengertian, Dimensi, Fungsi, dan Peranan Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Imron, A. & Burhanuddin. 2003. *Manajemen Peserta Didik. Manajemen Pendidikan Analisis Substantif dan Aplikasinya dalam Institusi Pendidikan*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Irianto & Sa'ud. 2009. *Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional: Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Kasman. 2010. Improvisasi Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran Sekolah Bermutu. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 23 (2): 122-130.
- Maisyaroh. *Manajemen Partisipasi Masyarakat Berbasis Sekolah: Perspektif Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Mas, S.R. 2011. Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua dalam Penyelenggaraan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 23 (3): 298-304.
- McMahon, W.W. 2001. *Education and Development: Measuring the Social Benefits*. Oxford: Oxford University Press.
- Murniati AR. 2009. Strategi Kepala Sekolah dalam Pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 16 (2): 126-134.
- Nasution, S. 2012. *Kurikulum & Pengajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Jakarta: Depdiknas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Kemendikbud.
- Purwanto, N. 2009. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Siswono, T.Y.E., Rosyidi, A.H., Astuti, Y.P., & Kurniasari, I. 2012. Pemberdayaan Guru dalam Pembelajaran Matematika untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa SD. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 18 (2): 210-219.
- Subroto, W.T. 2011. *Analisis Pengaruh Pemberdayaan Pendidik terhadap Kinerjanya dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar Kota Surabaya*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sudarsyah, A. & Nurdin, D. 2009. *Manajemen Implementasi Kurikulum. Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Supriyadi, A. 2011. Analisis Prakondisi Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 18 (1): 47-56.
- Suratman, B. 2010. Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah, Ketersediaan Sarana Prasarana, Kapabilitas Mengajar Pendidik, dan Dukungan Orang Tua, Kaitannya dengan Prestasi Belajar Peserta Didik SMP Negeri di Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 17 (1): 89-97.
- Suryosubroto, B. 2010. *Beberapa Aspek Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjiptono, F. 2008. *Service Management Mewujudkan Layanan Prima*. Yogyakarta: Andi.
- Usman, H. 2010. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wiyono, B.B. 2010. Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 23 (1): 1-9.